



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : RUTH HERAWATI
NIK : 3372034912620004
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Unit Kerja : RSJD SURAKARTA
Sub Unit Kerja : BIDANG PELAYANAN MEDIS
Jabatan : KASI PELAYANAN RAWAT JALAN, REHABILITASI &
KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
Jenis Laporan : Periodik - 2018
Tanggal Kirim : 22 Februari 2019

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

Lengkap

Tidak Lengkap



**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSJD SURAKARTA
SUB UNIT KERJA : BIDANG PELAYANAN MEDIS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUTH HERAWATI
2. Jabatan : KASI PELAYANAN RAWAT JALAN, REHABILITASI & KESEHATAN JIWA
MASYARAKAT
3. NHHK : 209539

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	450.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m ² /78 m ² di SUKOHARJO, WARISAN Rp. 200.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m ² /78 m ² di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	31.000.000
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	145.531.327
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	630.431.327
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	630.431.327

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Maret 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.